

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir (TNP2K, 2017). *Stunting* memiliki efek jangka pendek terhadap gangguan metabolisme dalam tubuh (Apriluana and Fikawati, 2018). Kemudian efek jangka panjang yaitu pada individu anak dan masyarakat, termasuk: penurunan perkembangan kognitif dan fisik, penurunan kapasitas produktifitas dan kesehatan yang buruk, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes.

Jika tren *stunting* ini tetap stabil dan berlanjut, maka proyeksi menunjukkan bahwa 127 juta anak di bawah 5 tahun akan terhambat pada tahun 2025 mendatang (WHO Stunting Policy Brief, 2014). Penelitian mengenai potensi kerugian ekonomi akibat *Stunting* di Indonesia tahun 2013 juga disimpulkan memiliki besar potensi kerugian secara nasional pada balita *Stunting* sekitar Rp 3.057 miliar-Rp 13.758 miliar atau 0,04-0,16% dari total PDB Indonesia. Potensi kerugian ekonomi karena *stunting* pada balita di Indonesia mencapai Rp 1,7 juta/orang/tahun atau Rp 71 juta/orang selama 49 tahun (usia produktif 15-64 tahun) berdasarkan BPS Tahun 2014 (Renyonet, Martianto and Sukandar, 2016).

Pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia ini mengalami *stunting*. Namun angka ini sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka *stunting* pada tahun 2000 yaitu sebesar 32,6%. Kemudian berdasarkan data prevalensi *stunting* yang dikumpulkan oleh WHO, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di bagian Asia Tenggara/*South-East Asia Regional (SEAR)* dengan rata-rata prevalensi balita *stunting* di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4% (RISKESDAS, 2019). Namun, hasil RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa adanya penurunan angka *stunting* di Indonesia yang semula sebesar 36,8 % (2007) dan 37,2 % (2013) menjadi 30,8 % (2018) (RISKESDAS,

2019). Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan Provinsi Jawa Barat memiliki prevalensi *stunting* sebesar 31.1 % yang artinya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 35.3 %. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan juga bahwa prevalensi *Stunting* di Kabupaten Bogor sebesar 32.9 % (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jawa Barat, 2019).

Berdasarkan data prevalensi *Stunting* yang sudah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa angka persentase *Stunting* di Indonesia masih terbilang tinggi walau dari tahun ke tahun mengalami tren penurunan yang memuaskan. Dengan adanya situasi tersebut yang seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah maupun masyarakat, perlu adanya suatu program yang dilaksanakan untuk menurunkan angka persentase kasus *stunting* yang masih tinggi di Indonesia. Sebagai umpan balik dari keadaan *Stunting* di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota. Salah satu upaya penurunan kejadian *stunting* dapat dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengurangi penyebab secara langsung (sektor kesehatan) dan intervensi gizi sensitif untuk mengurangi penyebab secara tidak langsung (sektor non-kesehatan) (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018).

Intervensi Gizi Spesifik hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30 % dalam upaya mengatasi penurunan *Stunting* pada balita pada sektor kesehatan. Sedangkan kontribusi yang lain diberikan oleh intervensi gizi sensitif yaitu sebesar 70 % yang umumnya dilakukan dari sektor non-kesehatan (Peraturan Menteri PPN Nomor 1 tahun 2018). Pedoman tersebut menyebutkan bahwa intervensi gizi sensitif berfokus pada Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; serta Peningkatan akses pangan bergizi (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan *Stunting* pada tahun 2024 mencapai 14 %. Selain target penurunan *stunting* dalam RPJMN, pemerintah juga menargetkan pada tahun 2018 sebanyak 1.000 Desa yang berfokus pada

Kabupaten/Kota menjadi prioritas. Kemudian pada tahun 2019 sebanyak 1.600 Desa yang berfokus pada Kabupaten/Kota menjadi prioritas. Barulah pada rentang tahun 2020-2024 pemerintah menargetkan semua Desa di semua Kabupaten/Kota menjadi prioritas secara bertahap ((TNP2K), 2018).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2018-2023, Kabupaten Bogor menargetkan penurunan *Stunting* pada tahun 2023 mencapai 19.6%. Faktor lain yang mendukung upaya penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif di Kabupaten Bogor adalah melalui Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Instruksi Bupati Nomor 440/884 tentang Intervensi *Stunting* terintegrasi dan SK Tim Koordinasi Nomor 44/294/Kpts/per-UU/2019 tentang Pelaksanaan Aksi Integrasi *Stunting* (Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023) yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 444/127/Kpts/Per-UU/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tingkat Kabupaten Bogor. Kemudian kebijakan tentang lokasi *Stunting* tahun 2022 di Kabupaten Bogor diatur dalam SK Bupati Nomor: 444/383/Kpts/Per-UU/2021 Tentang Penetapan Lokasi Intervensi *Stunting* di Kabupaten Bogor Pada 104 Desa di 34 Kecamatan.

Peraturan tersebut juga diperkuat berdasarkan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan Terwujudnya Masyarakat Bogor Sehat dengan arah kebijakannya yaitu Menggalakan Gerakan Bogor Bebas *Stunting* (RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023). Dari indikator program prioritas RPJMD tahun 2018 – 2023 tersebut yang berhubungan dengan 4 faktor utama dalam jenis intervensi gizi sensitif, implementasi program dari kebijakan tersebut sebagian besar sudah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah kabupaten Bogor. Masih perlu adanya analisis dan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi program-program yang terdapat pada Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

terkait Analisis Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Dalam Menurunkan Kejadian *Stunting* Di Kabupaten Bogor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Tingkatan prevalensi *Stunting* di Indonesia terbilang masih cukup tinggi berdasarkan Riskesdas pada tahun 2018 yaitu sebesar 30,8 % (RISKESDAS, 2019). Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan Provinsi Jawa Barat memiliki prevalensi *stunting* sebesar 31.1 % yang artinya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 35.3 %. Sedangkan pada hasil Survei SSGI tahun 2021 pada Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan kembali dari tahun 2019 yaitu sebesar 24.5% (SSGI, 2021). Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan juga bahwa prevalensi *Stunting* di Kabupaten Bogor sebesar 32.9 % (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jawa Barat, 2019). Kemudian data menurut Survei SSGI tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi *Stunting* di Kabupaten Bogor mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 28.6% (SSGI, 2021).

Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi angka *Stunting* yang masih tinggi, maka pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota diharuskan mengikuti pedoman tersebut dan melakukan upaya untuk menurunkan angka *Stunting* di wilayah kerjanya melalui kebijakan maupun dalam bentuk program ataupun kegiatan. Namun fokus pada penelitian ini adalah analisis implementasi kebijakan pada program yang terkait dengan intervensi gizi sensitif yang berkontribusi sebesar 70 % yang umumnya dilakukan dari sektor non-kesehatan dalam menurunkan kejadian *Stunting* ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait Analisis

Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Dalam Menurunkan Kejadian *Stunting* Di Kabupaten Bogor.

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Dalam Menurunkan Kejadian *Stunting* Di Kabupaten Bogor.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Bogor;
- b. Mengetahui tim khusus percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Bogor;
- c. Mengetahui implementasi kebijakan dari 4 faktor utama dalam jenis intervensi gizi sensitif dalam upaya penurunan *Stunting* di Kabupaten Bogor;
- d. Mengetahui dampak dari implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif terhadap penurunan *stunting* di Kabupaten Bogor.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Bagi Informan

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi bagi informan/masyarakat terkait Analisis implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Dalam Menurunkan Kejadian *Stunting*.

I.4.2 Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan data penelitian untuk dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Dalam Menurunkan Kejadian *Stunting*.

1.4.3 Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap Analisis Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Dalam Menurunkan Kejadian *Stunting*.